

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019**

**BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Rencana pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **I.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010;
  12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
  13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro

Administrasi Kemasyarakatan dan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat digabung dan nomenklaturnya menjadi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
16. Peraturan Gubernur nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mewujudkan program kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Provinsi Jawa Timur.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 meliputi :

- BAB I     PENDAHULUAN
  - I.1.    Latar Belakang
  - I.2.    Landasan Hukum
  - I.3.    Maksud dan Tujuan
  - I.4.    Sistematika Penulisan
- BAB II    HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
- BAB III   TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V     PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui hasil dan efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di tahun berikutnya.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan 6 program pembangunan dan diimplementasikan kedalam 22 kegiatan. Untuk pelaksanaan tahun 2017 dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

###### **a) Pagu dan Realisasi Anggaran**

Pagu Anggaran **Program pelayanan administrasi perkantoran** Rp.3.410.272.240,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.188.858.271,00 atau 93.51% sampai akhir tahun anggaran 2017.

###### **b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)**

Hasil pelaksanaan pembangunan Program **pelayanan administrasi perkantoran** adalah index kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor sebesar 93.51% Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

Pelaksanaan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp.3.410.272.240,00 Realisasi sebesar Rp. 3.188.858.271,00 atau 93.51% output yang akan dicapai adalah persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target capaian sebesar 100% dan terealisasi 93.51%

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

###### **a) Pagu dan Realisasi Anggaran**

Pagu Anggaran **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** sebesar Rp. 2.596.757.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.403.895.686,00 atau 92,57 % sampai akhir tahun anggaran 2017.

**b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)**

Hasil pelaksanaan pembangunan Program **peningkatan sarana dan prasarana aparatur** adalah persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi sebesar 100%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana dengan anggaran Rp.1.852.783.560,00 Realisasi sebesar Rp.1.678.855.876,00 atau 90,61%. output yang akan dicapai adalah Prosentase penyediaan Peralatan dan Sarana dengan target capaian sebesar 100% dan terealisasi 90,61%.
- 2) Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana dengan anggaran Rp. 743.974.200,00 Realisasi sebesar Rp.725.039.810 ,00 atau 97,45%. output yang akan dicapai adalah Persentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target capaian sebesar 100% dan terealisasi 97,45 %

**3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

**a) Pagu dan Realisasi Anggaran**

Pagu Anggaran **Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** sebesar Rp.394.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.343.360.140,00 atau 86,93% sampai akhir tahun anggaran 2017.

**b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)**

Hasil pelaksanaan pembangunan Program **peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** adalah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi sebesar 100%. Program ini didukung 2 (dua) kegiatan, antara lain:

- 1) **Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah** dengan anggaran Rp.160.000.000,00 Realisasi sebesar Rp.127.187.300,00 atau 79,49%. output yang dicapai adalah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100% dan terealisasi 79,49%.
- 2) **Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** dengan anggaran Rp.234.962.000,00 Realisasi sebesar Rp. 216.172.840,00 atau 92%. output yang dicapai adalah Prosentase pelaksanaan Kegiatan dengan target 100% dan terealisasi 92%

**4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**

**a) Pagu dan Realisasi Anggaran**

Pagu Anggaran **Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan** sebesar Rp. 154.524.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 144.155.100,00 atau 93,29 % sampai akhir tahun anggaran 2017.

**b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)**

Hasil pelaksanaan pembangunan Program **penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan** adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu sebesar 93,29%. Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- 1) **Penyusunan dokumen perencanaan** dengan anggaran Rp.56.462.000,00 Realisasi sebesar Rp. 47.060.000,00 atau 83,35%. output yang dicapai adalah prosentase dokumen perencanaan yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 83,35%
- 2) **Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran** dengan anggaran Rp. 82.462.000,00 Realisasi sebesar Rp.82.275.000,00 atau 99,77%. output yang dicapai adalah prosentase laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 99,77%.
- 3) **Penyusunan, pengembangan pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi Data** dengan anggaran Rp. 15.600.000,00 Realisasi sebesar Rp.14.820.100,00 atau 95%. Output yang dicapai adalah prosentase pelaksanaan sistem informasi data yang terealisasi sebesar 95%.

## 5. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

### a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp.**6.805.415.000,00** dan terealisasi sebesar Rp. 6.469.284.782,00 atau 95,06 % sampai akhir tahun anggaran 2017.

### b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial sebesar 95,06 %. Program ini didukung 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- 1) **Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat** dengan anggaran Rp.5.102.259.000,00 Realisasi sebesar Rp. 4.923.155.500,00 atau 96,49%. output yang dicapai adalah Prosentase pelaksanaan kegiatan hari besar yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 96,49%
- 2) **Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan** dengan anggaran Rp. 253.221.950,00 Realisasi sebesar Rp.241.982.450,00 atau 95,56%. output yang dicapai adalah Prosentase pelaksanaan kegiatan Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 95,56%.

- 3) **Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum** dengan anggaran Rp. 345.643.900,00 Realisasi sebesar Rp.307.844.100,00 atau 89,06%. Output yang dicapai adalah Prosentase pelaksanaan kegiatan Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum yang terealisasi sebesar 89,06%.
- 4) **Penanganan Bencana** dengan anggaran Rp. 236.191.000,00 Realisasi sebesar Rp.185.014.872,00 atau 78,33%. Output yang dicapai adalah Prosentase pelaksanaan kegiatan penanganan bencana yang terealisasi sebesar 78,33%.
- 5) **Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat** dengan anggaran Rp. 400.000.000,00 Realisasi sebesar Rp.359.065.600,00 atau 89,77%. Output yang dicapai adalah Prosentase pelaksanaan kegiatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat yang terealisasi sebesar 89,77%.
- 6) **Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi** dengan anggaran Rp.468.099.150,00 Realisasi sebesar Rp.452.222.260,00 atau 96,61%. Output yang dicapai adalah Prosentase pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi yang terealisasi sebesar 96,61%.

## 6. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan

### a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan sebesar Rp.**24.982.536,00** dan terealisasi sebesar Rp. 23.112.671.226,00 atau 92,52% sampai akhir tahun anggaran 2017.

### b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan adalah persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial sebesar 92,52%. Program ini didukung 8 (delapan) kegiatan, yaitu:

- 1) **Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah** dengan anggaran Rp.657.645.000,00 Realisasi sebesar Rp.620.956.085,00 atau 94,42%. output yang dicapai adalah Presentase pelaksanaan kegiatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 94,42%.
- 2) **Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan** dengan anggaran Rp. 4.310.306.000,00 Realisasi sebesar Rp. 4.108.078.996,00 atau 95,31%. output yang dicapai adalah Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 95,31%.



- 3) **Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan** dengan anggaran Rp. 4.330.000.000,00 Realisasi seb.esar Rp. 4.067.342.371,00 atau 94,57%. output yang dicapai adalah Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 94,57%.
- 4) **Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga** dengan anggaran Rp. 4.010.000.000,00 Realisasi seb.esar Rp. 3.689.018.174,00 atau 92%. output yang dicapai adalah Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 92%.
- 5) **Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dengan anggaran Rp. 2.107.785.000,00 Realisasi seb.esar Rp. 1.950.020.252,00 atau 92,52%. output yang dicapai adalah Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 92,52%.
- 6) **Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan** dengan anggaran Rp. 1.300.000.000,00 Realisasi seb.esar Rp. 1.191.405.380,00 atau 91,65%. output yang dicapai adalah Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 91,65%.
- 7) **Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata** dengan anggaran Rp. 230.000.000,00 Realisasi seb.esar Rp. 181.539.129,00 atau 78,93%. output yang dicapai adalah Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 78,93%.
- 8) **Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan** dengan anggaran Rp. 8.036.800.000,00 Realisasi seb.esar Rp.7.276.588.789,00 atau 90,54%. output yang dicapai adalah Presentase Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang telah diselesaikan terealisasi sebesar 90,54%.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2018**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2016	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017			target program dan kegiatan (renja tahun 2018)	perkiraan realisasi capaian target renstra 2018	
				K	K	Target	realisasi	Tingkat Realiasi (%)		realisasi	tingkat rrealisasi (%)
				K	K	K	K	K		K	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
0 3 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	%	100		100	3.188.858.271	93,51	100	3.188.858.271	93,51
0 3 01 19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan	%	100		100	3.188.858.271	93,51	100	3.188.858.271	93,51
0 3 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100		100	2.403.895.686	92,57	100	2.403.895.686	92,57
0 3 02 012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase penyediaan Peralatan dan Sarana	%	100		100	1.678.855.876	90,61	100	1.678.855.876	90,61
0 3 02 031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase Peralatan dan Sarana yang terpelihara	%	100		100	725.039.810	97,45	100	725.039.810	97,45
0 3 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	%	100		100	343.360.140	86,93	100	343.360.140	86,93
0 3 07 001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	%	100		100	127.187.300	79,49	100	127.187.300	79,49
0 3 07 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pelaksanaan Kegiatan	%	100		100	216.172.840	92	100	216.172.840	92

Kode Program/ Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2016	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017			target program dan kegiatan (renja tahun 2018)	perkiraan realisasi capaian target renstra 2018	
									Target	realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi	tingkat rrealisasi (%)
									K	K	K		K	K
0	3	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100		100	144.155.100	93,29	100	144.155.100	93,29
0	3	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Prosentase Dokumen perencanaan yang telah diselesaikan	%	100		100	47.060.000	83,35	100	47.060.000	83,35
0	3	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Prosentase Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran yang telah diselesaikan	%	100		100	82.275.000	99,77	100	82.275.000	99,77
0	3	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Prosentase pelaksanaan sistem informasi data	%	100		100	14.820.100	95	100	14.820.100	95
0	3	81		Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial	%	100		100	6.469.284.782	95,06	100	6.469.284.782	95,06
0	3	81	004	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan hari besar	%	100		100	4.923.155.500	96,49	100	4.923.155.500	96,49
0	3	81	005	Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan	Persentase pelaksanaan kegiatan Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan	%	100		100	241.982.450	95,56	100	241.982.450	95,56

Kode Program/ Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2016	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017			target program dan kegiatan (renja tahun 2018)	perkiraan realisasi capaian target renstra 2018	
									Target	realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi	tingkat rrealisasi (%)
									K	K	K		K	K
0	3	81	006	Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum	Persentase pelaksanaan kegiatan Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum	%	100		100	307.844.100	89,06	100	307.844.100	89,06
0	3	81	008	Penanganan Bencana	Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan bencana	%	100		100	185.014.872	78,33	100	185.014.872	78,33
0	3	81	009	Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	%	100		100	359.065.600	89,77	100	359.065.600	89,77
0	3	81	011	Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi	Persentase pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi	%	100		100	452.222.260	96,61	100	452.222.260	96,61
0	3	83		Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kemasyarakatan	%	100		100	23.112.671.226	92,52	100	23.112.671.226	92,52
0	3	83	001	Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	Persentase pelaksanaan kegiatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	%	100		100	620.956.085	94,42	100	620.956.085	94,42
0	3	83	002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan	Persentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan	%	100		100	4.108.078.996	95,31	100	4.108.078.996	95,31

Kode Program/ Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2016	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017			target program dan kegiatan (renja tahun 2018)	perkiraan realisasi capaian target renstra 2018	
							K	K	Target	realisasi	Tingkat Realisasi (%)	K	realisasi	tingkat rrealisasi (%)
							K	K	K	K	K	K	K	
0	3	83	003	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	%	100		100	4.067.342.371	94,57	100	4.067.342.371	94,57
0	3	83	004	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	%	100		100	3.689.018.174	92	100	3.689.018.174	92
0	3	83	005	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100		100	1.950.020.252	92,52	100	1.950.020.252	92,52
0	3	83	006	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	%	100		100	1.191.405.380	91,65	100	1.191.405.380	91,65
0	3	83	007	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	%	100		100	181.539.129	78,93	100	181.539.129	78,93
0	3	83	008	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	Presentase pelaksanaan kegiatan Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	%	100		100	7.276.588.789	90,54	100	7.276.588.789	90,54

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di memiliki tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial, untuk mencapai tujuan tersebut Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki sasaran yaitu Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan target capaian masing-masing. Untuk mencapai target sasaran dan mencapai tujuan dari Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 6 program dengan pencapaian dan proyeksi tahun berikutnya sesuai Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SPM/stand ar nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase dukungan layanan lingkup Administrasi Kesejahteraan Sosial (Rumusan kebijakan yg ditindak-lanjuti menjadi kebijakan) di Bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.			100%	100%	100%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor			100%	100%	100%					93,51			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi			100%	100%	100%					92,57			
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi			100%	100%	100%					86,93			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SPM/stand ar nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Perangkat Daerah														
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu			100%	100%	100%					93,29			
	Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian	Persentase rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Mental Kerohanian			100%	100%	100%					94,42			
	Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata			100%	100%	100%					94,57			
	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			100%	100%	100%					96,61			
	Program layanan administrasi bidang	Persentase rumusan kebijakan di Bidang			100%	100%	100%					89,77			



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SPM/stand ar nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Sosial, Kesehatan, Penmgendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti													

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Kemasyarakatan dan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat digabung dan nomenklaturnya menjadi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi Kesejahteraan Sosial ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di Bidang Administrasi Kesejahteraan Sosial ; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Tingkat kinerja pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur diukur melalui realisasi capaian target indikator sasaran sebagaimana tertera pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.3** Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi Capaian			Ket.
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	
	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial			100 %			98,77%	
		Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kemasyarakatan			100 %			91,47%	

### 2.3.2 Hambatan dan Dukungan pada Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat berbagai kelemahan dan ancaman yang menjadi hambatan serta kekuatan dan peluang yang menjadi pendukung dalam pencapaian tujuan/sasaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Analisa terhadap kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman tersebut merupakan dasar dalam penentuan isu - isu strategis Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Secara detail analisa terhadap kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur disajikan pada Tabel 2.3.2

**Tabel 2.4 Analisa terhadap Kekuatan, Peluang, Kelemahan serta Ancaman pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

No.	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threats</i> (Ancaman)
	Terjalannya koordinasi yang cukup baik dalam menangani Permasalahan Sosial	Belum optimalnya koordinasi dengan Kabupaten / Kota se Jawa Timur dengan harapan untuk merealisasikan visi misi	Adanya kesempatan dari Pemerintah Pusat/Lembaga Non Pemerintah untuk melakukan penanganan secara konkrit dan terukur, berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota se Jawa Timur	Masih adanya ego-sektoral baik dalam lingkup internal maupun antar PD

### 2.3.3 Isu – Isu Strategis Pelayanan PD

Untuk mewujudkan Jawa Timur makmur dan berakhlak, diperlukan landasan kesalehan sosial dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Pembangunan kesalehan sosial diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai Jawa Timur makmur dan berakhlak.

Pembangunan akhlak yang mulia membutuhkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesalehan sosial dalam beragama juga akan menciptakan iklim kondusif bagi terciptanya harmonisasi kehidupan sosial, sehingga ketegangan sosial yang memicu konflik internal dan/atau antar-umat beragama dapat dicegah secara dini tanpa harus merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap, gambaran pelayanan, kondisi internal dan eksternal, evaluasi Renja dari Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang memiliki pemahaman terkait isu dan permasalahan pembangunan Jawa Timur, maka isu-isu strategis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya payung hukum yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah khususnya dibidang agama
2. Pemahaman Agama Belum Sepenuhnya Teraktualisasikan dalam Kehidupan Sehari-hari
3. Belum Maksimalnya Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berfungsi sebagai Lembaga Resolusi Konflik
4. Belum Teratasinya Kesenjangan Sosial Ekonomi

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur**

**Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial**

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surabaya	Indeks kepuasan masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	3.236.443.555,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surabaya	Indeks kepuasan masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	3.236.443.555,00	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	3.236.443.555,00	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	3.236.443.555,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Surabaya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	2.216.016.694,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Surabaya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	2.216.016.694,00	
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia	100 paket / unit	1.833.016.694,00	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia	100 paket / unit	1.833.016.694,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan & perlengkapan sarana yang terpelihara	12 paket	383.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan & perlengkapan sarana yang terpelihara	12 paket	383.000.000,00	
	Program Peningkatan	Surabaya	Prosentase kelembagaan yang	100%	358.499.059,00	Program Peningkatan	Surabaya	Prosentase kelembagaan yang	100%	358.499.059,00	

No.	Rancangan Awal RKPd Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		tepat fungsi			Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		tepat fungsi			
	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Konsultasi	15 kali	160.000.000,00	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Konsultasi	15 kali	160.000.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	20 pegawai	198.499.059,00	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	20 pegawai	198.499.059,00	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200 pegawai				Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200 pegawai		
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Surabaya	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	140.258.325,00	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Surabaya	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	140.258.325,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Surabaya	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah tersusun	4 dokumen	45.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Surabaya	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah tersusun	4 dokumen	45.000.000,00	
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan	Surabaya	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 dokumen	52.258.325,00	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan	Surabaya	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 dokumen	52.258.325,00	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rencana Program dan Anggaran		yang tersusun			Rencana Program dan Anggaran		yang tersusun			
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Surabaya	Jumlah update database perangkat daerah	12 Paket	15.000.000,00	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Surabaya	Jumlah update database perangkat daerah	12 Paket	15.000.000,00	
	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Surabaya	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 dokumen	28.000.000,00	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Surabaya	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 dokumen	28.000.000,00	
	Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Surabaya	Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	100%	1.795.750.450,00	Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Surabaya	Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	100%	1.795.750.450,00	
			Rangkaian kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan	8 kegiatan				Rangkaian kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan	8 kegiatan		
	Peningkatan Kualitas Guru Madin	Kab/Kota Se Jatim	Persentase Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	100%	595.750.450,00	Peningkatan Kualitas Guru Madin	Kab/Kota Se Jatim	Persentase Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	100%	595.750.450,00	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan	Kab/Kota Se Jatim	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	100%	700.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Mental Keagamaan	Kab/Kota Se Jatim	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	100%	700.000.000,00	
	Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian	Surabaya	Jumlah rekomendasi di bidang kerohanian	12 rekomendasi	500.000.000,00	Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian	Surabaya	Jumlah rekomendasi di bidang kerohanian	12 rekomendasi	500.000.000,00	
	Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kab/Kota Se Jatim	kebijakan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	100%	1.000.000.000,00	Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kab/Kota Se Jatim	kebijakan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	100%	1.000.000.000,00	
	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	Kab/Kota Se Jatim	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti	100%	300.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	Kab/Kota Se Jatim	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti	100%	300.000.000,00	
	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	Surabaya	Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan keolahragaan yang ditindaklanjuti	12 rumusan	300.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	Surabaya	Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan keolahragaan yang ditindaklanjuti	12 rumusan	300.000.000,00	
	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di	Kab/Kota Se Jatim	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan yang	12 rumusan	200.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di	Kab/Kota Se Jatim	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan yang	12 rumusan	200.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bidang Kebudayaan		ditindaklanjuti			Bidang Kebudayaan		ditindaklanjuti			
	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	Surabaya	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata yang ditindaklanjuti	12 rumusan	200.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	Surabaya	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata yang ditindaklanjuti	12 rumusan	200.000.000,00	
	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigreasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	1.000.000.000,00	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigreasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	1.000.000.000,00	
	Penanganan Tenaga Kerja	Kab/Kota Se Jatim	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Ketenaga kerjaan yang ditindaklanjuti	100%	300.000.000,00	Penanganan Tenaga Kerja	Kab/Kota Se Jatim	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Ketenaga kerjaan yang ditindaklanjuti	100%	300.000.000,00	
	Penanganan Transmigrasi	Surabaya	Jumlah Rekomendasi di Bidang Transmigrasi	4 rekomendasi	200.000.000,00	Penanganan Transmigrasi	Surabaya	Jumlah Rekomendasi di Bidang Transmigrasi	4 rekomendasi	200.000.000,00	
	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	Surabaya	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti	12 rumusan	500.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	Surabaya	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti	12 rumusan	500.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perlindungan Anak					Perlindungan Anak					
	Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Kab/Kota Se Jatim	Kebijakan di Bidang Sosial, Kesehatan, Penmgendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	1.000.000.000,00	Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Kab/Kota Se Jatim	Kebijakan di Bidang Sosial, Kesehatan, Penmgendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	1.000.000.000,00	
	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Kab/Kota Se Jatim	Surat Edaran dan SK Gubernur	4 surat dan SK Gubernur	500.000.000,00	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Kab/Kota Se Jatim	Surat Edaran dan SK Gubernur	4 surat dan SK Gubernur	500.000.000,00	
	Penanganan Bencana	Surabaya	Jumlah rekomendasi di Bidang Penanganan Bencana	12 rekomendasi	200.000.000,00	Penanganan Bencana	Surabaya	Jumlah rekomendasi di Bidang Penanganan Bencana	12 rekomendasi	200.000.000,00	
	Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kab/Kota Se Jatim	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti	12 rumusan	300.000.000,00	Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Surabaya	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti	12 rumusan	300.000.000,00	
	Program dukungan layanan	Kab/Kota Se Jatim		100%	3.553.031.917,00	Program dukungan layanan	Kab/Kota Se Jatim		100%	3.553.031.917,00	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial					administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial					
	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Surabaya	Prosentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	100%	3.553.031.917,00	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Surabaya	Prosentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	100%	3.553.031.917,00	
	<b>Total</b>										

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32/ Tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur**

**Nama Perangkat Daerah : Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Setda Prov.Jatim**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

*“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”.*

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2014 – 2019 dan mengacu kepada tugas dan fungsi yang melekat pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka akan mendukung sepenuhnya agar terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut. Adapun Strategi untuk mencapai peningkatan kesalehan sosial adalah makin meningkatnya harmoni sosial di dalam masyarakat Jawa Timur, sehingga mampu mencegah dan meredam konflik sosial di antara intra-umat beragama, ataupun antar-umat beragama, serta konflik berdimensi lainnya.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1. Tujuan :**

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial”

### Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial	Persentase dukungan layanan lingkup Administrasi Kesejahteraan Sosial (Rumusan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan) di Bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

#### 3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada adalah sebagai berikut :

- **Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial
- **Sasaran** : Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial	100%	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	Persentase dukungan layanan lingkup Administrasi Kesejahteraan Sosial (Rumusan kebijakan yg ditindak-lanjuti menjadi kebijakan) di Bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	A

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- (a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
- (b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- (c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;



- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
- (e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Program Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Kapasitas ;
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan ;
5. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat ;
6. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan ;

Kegiatan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ;
2. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana ;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana ;
4. Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah ;
5. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah ;
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan ;
7. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran ;
8. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data ;
9. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan ;
10. Peningkatan Kualitas Guru Madin ;
11. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang keagamaan ;
12. Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian ;
13. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pendidikan ;
14. pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga ;
15. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Kebudayaan ;
16. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pariwisata ;
17. Penanganan Tenaga Kerja ;
18. Penanganan Transmigrasi ;
19. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
20. Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat ;

21. Penanganan Bencana ;
22. Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
23. Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan ;

**Dasar Perumusan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019**

No	Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Keterangan Capaian Kinerja (Belum Tercapai/ Tercapai/ Melampaui Target)	Rekomendasi	Rumusan Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	100 paket / unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 paket		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100%		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
a.	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	15 kali		Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
b.	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	20 pegawai dan 200 pegawai		Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	100%		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan
b.	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	4 dokumen		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
c.	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	15 Paket		Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
d.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	1 dokumen		Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
5.	Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	100%		Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian
a.	Peningkatan Kualitas Guru Madin	100%		Peningkatan Kualitas Guru Madin
b.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di	100%		Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di

No	Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Keterangan Capaian Kinerja (Belum Tercapai/ Tercapai/ Melampaui Target)	Rekomendasi	Rumusan Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019
	Bidang Keagamaan			Bidang Keagamaan
c.	Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian	12 rekomendasi		Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian
6.	Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	100%		Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
a.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	100%		Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan
b.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	12 rumusan		Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga
c.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	12 rumusan		Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan
d.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	12 rumusan		Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata
7.	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%		Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.	Penanganan Tenaga Kerja	100%		Penanganan Tenaga Kerja
b.	Penanganan Transmigrasi	4 rekomendasi		Penanganan Transmigrasi
c.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12 rumusan		Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100%		Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
a.	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	4 surat dan SK Gubernur		Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat
b.	Penanganan Bencana	100%		Penanganan Bencana
c.	Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 rumusan		Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Program dukungan	100%		Program dukungan

No	Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Keterangan Capaian Kinerja ( <i>Belum Tercapai/ Tercapai/ Melampaui Target</i> )	Rekomendasi	Rumusan Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019
	layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial			layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial
a.	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	100%		Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan

**Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019**

**Tabel 2.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	<b>Urusan Penunjang Pemerintahan</b>											
0	3	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	Surabaya	100%	3.236.443.555,00	APBD		100%	3.236.443.555,00
0	3	01	19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Surabaya	100%	3.236.443.555,00	APBD		100%	3.236.443.555,00
0	3	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	Surabaya	100%	2.216.016.694,00	APBD		100%	2.216.016.694,00
0	3	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia	Surabaya	100 paket/unit	1.833.016.694,00	APBD		100 paket/unit	1.833.016.694,00
0	3	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan & perlengkapan sarana yang terpelihara	Surabaya	12 paket	383.000.000,00	APBD		12 paket	383.000.000,00
0	3	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	Surabaya	100%	358.499.059,00	APBD		100%	358.499.059,00
0	3	07	001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	Surabaya	15 kali	160.000.000,00	APBD		15 kali	160.000.000,00
0	3	07	002	Pembinaan Sumber Daya	Jumlah pegawai yang	Surabaya	20	198.499.059,00	APBD		20 pegawai	198.499.059,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Aparatur Perangkat Daerah	mengikuti pendidikan/pelatihan formal		pegawai								
		Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM		200 pegawai		APBD		200 pegawai				
0	3	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Surabaya	100%	140.258.325,00	APBD		100%	140.258.325,00
0	3	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah tersusun	Surabaya	4 dokumen	45.000.000,00	APBD		4 dokumen	45.000.000,00
0	3	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Surabaya	4 dokumen	52.258.325,00	APBD		4 dokumen	52.258.325,00
0	3	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	Surabaya	12 paket	15.000.000,00	APBD		12 paket	15.000.000,00
0	3	08	004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Surabaya	1 dokumen	28.000.000,00	APBD		1 dokumen	28.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
0	3	32		Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti		100%	1.795.750.450,00	APBD		100%	1.795.750.450,00
					Rangkaian kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan		8 kegiatan		APBD		8 kegiatan	
0	3	32	001	Peningkatan Kualitas Guru Madin	Persentase Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	Surabaya	100%	595.750.450,00	APBD		100%	595.750.450,00
0	3	32	002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Mental Keagamaan	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	Kab/Kota Se Jatim	100%	700.000.000,00	APBD		100%	700.000.000,00
				Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian	Jumlah rekomendasi di bidang kerohanian	Surabaya	12 rekomend asi	500.000.000,00	APBD		12 rekomendas i	500.000.000,00
0	3	33		Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	kebijakan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Surabaya	100%	1.000.000.000,00	APBD		100%	1.000.000.000,00
0	3	33	001	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti	Kab/Kota Se Jatim	100%	300.000.000,00	APBD		100%	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 3 33 002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan keolahragaan yang ditindaklanjuti	Surabaya	12 rumusan	300.000.000,00	APBD		12 rumusan	300.000.000,00
0 3 33 003	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan yang ditindaklanjuti	Surabaya	12 rumusan	200.000.000,00	APBD		12 rumusan	200.000.000,00
0 3 33 004	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	Surabaya	12 rumusan	200.000.000,00	APBD		12 rumusan	200.000.000,00
0 3 34	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surabaya	100%	1.000.000.000,00	APBD		100%	1.000.000.000,00
0 3 34 001	Penanganan Tenaga Kerja	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	Kab/Kota Se Jatim	100%	300.000.000,00	APBD		100%	300.000.000,00
0 3 34 007	Penanganan Transmigrasi	Jumlah Rekomendasi di Bidang Transmigrasi	Surabaya	4 rekomendasi	200.000.000,00	APBD		4 rekomendasi	200.000.000,00
0 3 34 008	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan	Surabaya	12 rumusan	500.000.000,00	APBD		12 rumusan	500.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti										
0	3	35		Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Kebijakan di Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Surabaya	100%	1.000.000.000,00	APBD		100%	1.000.000.000,00
0	3	35	001	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Surat Edaran dan SK Gubernur	Kab/Kota Se Jatim	4 Surat dan SK Gub	500.000.000,00	APBD		4 Surat dan SK Gub	500.000.000,00
0	3	35	004	Penanganan Bencana	Jumlah rekomendasi di Bidang Penanganan Bencana	Surabaya	12 rekomend asi	200.000.000,00	APBD		12 rekomendas i	200.000.000,00
0	3	35	005	Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti	Surabaya	12 rumusan	300.000.000,00	APBD		12 rumusan	300.000.000,00
0	3	37		Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	Surabaya	100%	3.553.031.917,00	APBD		100%	3.553.031.917,00
0	3	37	001	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Prosentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	Surabaya	100%	3.553.031.917,00	APBD		100%	3.553.031.917,00
<b>Total</b>												

**Tabel 2.2. Kesesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2019 dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**

No	Ranwal Renja Tahun 2019			Rancangan Awal RKPD Tahun 2019			Keterangan
	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	3.236.443.555,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	3.236.443.555,00	Sesuai
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	3.236.443.555,00	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	3.236.443.555,00	Sesuai
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	2.216.016.694,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	2.216.016.694,00	Sesuai
a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia	1.833.016.694,00	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia	1.833.016.694,00	Sesuai
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan & perlengkapan sarana yang terpelihara	383.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan & perlengkapan sarana yang terpelihara	383.000.000,00	Sesuai
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	358.499.059,00	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	358.499.059,00	Sesuai
a.	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	160.000.000,00	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	160.000.000,00	Sesuai
b.	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	198.499.059,00	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	198.499.059,00	Sesuai
		Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM			Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM		
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	140.258.325,00	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	140.258.325,00	Sesuai

No	Ranwal Renja Tahun 2019			Rancangan Awal RKPD Tahun 2019			Keterangan
	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah tersusun	45.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah tersusun	45.000.000,00	Sesuai
b.	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	52.258.325,00	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	52.258.325,00	Sesuai
c.	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	15.000.000,00	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	15.000.000,00	Sesuai
d.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	28.000.000,00	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	28.000.000,00	Sesuai
5.	Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	1.795.750.450,00	Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	1.795.750.450,00	Sesuai
		Rangkaian kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan			Rangkaian kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan		
a.	Peningkatan Kualitas Guru Madin	Persentase Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	595.750.450,00	Peningkatan Kualitas Guru Madin	Persentase Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	595.750.450,00	Sesuai
b.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Mental Keagamaan	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	700.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Mental Keagamaan	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	700.000.000,00	Sesuai
c.	Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian	Jumlah rekomendasi di bidang kerohanian	500.000.000,00	Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian	Jumlah rekomendasi di bidang kerohanian	500.000.000,00	
6.	Program layanan administrasi bidang	kebijakan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga,	1.000.000.000,00	Program layanan administrasi bidang	kebijakan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga,	1.000.000.000,00	Sesuai

No	Ranwal Renja Tahun 2019			Rancangan Awal RKPD Tahun 2019			Keterangan
	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata		Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata		
a.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Sesuai
b.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan keolahragaan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan keolahragaan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Sesuai
c.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan yang ditindaklanjuti	200.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan yang ditindaklanjuti	200.000.000,00	Sesuai
d.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	200.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	200.000.000,00	Sesuai
7.	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000.000,00	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000.000,00	Sesuai
a.	Penanganan Tenaga Kerja	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Ketenaga kerjaan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Penanganan Tenaga Kerja	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Ketenaga kerjaan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Sesuai
b.	Penanganan Transmigrasi	Jumlah Rekomendasi di Bidang Transmigrasi	200.000.000,00	Penanganan Transmigrasi	Jumlah Rekomendasi di Bidang Transmigrasi	200.000.000,00	Sesuai
c.	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti	500.000.000,00	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti	500.000.000,00	Sesuai
8.	Program layanan	Kebijakan di Bidang Sosial,	1.000.000.000,00	Program layanan	Kebijakan di Bidang Sosial,	1.000.000.000,00	Sesuai

No	Ranwal Renja Tahun 2019			Rancangan Awal RKPD Tahun 2019			Keterangan
	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
	administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
a.	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Surat Edaran dan SK Gubernur	500.000.000,00	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Surat Edaran dan SK Gubernur	500.000.000,00	Sesuai
b.	Penanganan Bencana	Jumlah rekomendasi di Bidang Penanganan Bencana	200.000.000,00	Penanganan Bencana	Jumlah rekomendasi di Bidang Penanganan Bencana	200.000.000,00	Sesuai
c.	Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah rumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti	300.000.000,00	Sesuai
9.	Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	3.553.031.917,00	Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	3.553.031.917,00	Sesuai
a.	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Prosentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	3.553.031.917,00	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Prosentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	3.553.031.917,00	Sesuai

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Prioritas Provinsi

Prioritas Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi antara lain Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Pengungsi Konflik Sosial Sampang, Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah dan Program Peningkatan Kualitas Huffadz Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.1

Prioritas Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi

NO	PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR
1	Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Pengungsi Konflik Sosial Sampang (331 jiwa) selama 12 bulan @Rp. 709.000,-	331 jiwa	Surabaya	Program Layanan Administrasi Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat
2	Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah Tahun 2019 berupa beasiswa Guru Madin sejumlah 2015 orang @Rp. 9.000.000,- (35 PTKIS)	2015 orang	Seluruh Jawa Timur	Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Peningkatan Kualitas Guru Madin
3	Program Peningkatan Kualitas Huffadz Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 berupa insentif kepada para Huffadz sejumlah 1000 orang @ Rp. 150.000,-/bulan selama 12 bulan	1000 orang	Seluruh Jawa Timur	Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan

#### 3.2. Prioritas Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	<b>Urusan Penunjang Pemerintahan</b>											
0	3	32		Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	Surabaya	100%	<b>1.795.750.450,00</b>	APBD		100%	<b>1.795.750.450,00</b>
0	3	32	001	Peningkatan Kualitas Guru Madin	Persentase Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	Surabaya	100%	<b>595.750.450,00</b>	APBD		100%	<b>595.750.450,00</b>
0	3	32	002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Mental Keagamaan	Persentase rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	Kab/Kota Se Jatim	100%	<b>700.000.000,00</b>	APBD		100%	<b>700.000.000,00</b>
0	3	35		Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Kebijakan di Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Surabaya	100%	<b>1.000.000.000,00</b>	APBD		100%	<b>1.000.000.000,00</b>
0	3	35	001	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Surat Edaran dan SK Gubernur	Kab/Kota Se Jatim	4 Surat dan SK Gub	<b>500.000.000,00</b>	APBD		4 Surat dan SK Gub	<b>500.000.000,00</b>

### **3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Pendanaan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada BAB III



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Jawa Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Surabaya, Juli 2018

**Plt.KEPALA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001